

MODERASI BERAGAMA: Urgensi dan Kondisi Keberagamaan di Indonesia

Ibnu Chudzaifah¹⁾, Afroh Nailil Hikmah²⁾

^{1,2} Fakultas Tarbiyah IAIN Sorong

E-mail: ibnuchudzaifah@gmail.com

E-mail: afnayhikmah@gmail.com

Abstract

Cultural diversity (multicultural) is a natural event due to the meeting of various cultures, the interaction of various individuals and groups carrying cultural behavior, having different and specific ways of life. Diversities such as cultural diversity, family background, religion, and ethnicity interact with each other in the Indonesian community. In horizontal communication between communities, Mulyana said, clashes between tribes are still taking place in various areas, ranging from stereotypes and prejudices between tribes, discrimination, to open conflicts and massacres between tribes that take lives. Competition between tribes is not only in the community but also among political elites and even academics to occupy positions in various agencies. This study aims to explain the importance of being moderate in religion and also to see how the conditions of religion in Indonesia are through descriptive qualitative research. The results of this study are 1) Moderation of religion as an effort to always maintain that whatever variety of interpretations and understandings of religion are maintained according to the corridor so as not to bring up extreme religious ways. Because the main points of religious teachings are basically the same, such as humanity, justice, equality before the law, respect for human rights and other universal values. 2) Based on research conducted by the Ministry of Religion, it shows that the 2021 Religious Harmony Index (KUB) is in the good category. Its value is at the national average of 72.39, up 4.93 points from the previous year..

Keywords : Religious Moderation, Tolerance, Multicultural

Received Apr. 22, 2022	Revised May. 5, 2022	Accepted Jun. 25, 2022
------------------------	----------------------	------------------------

1. PENDAHULUAN

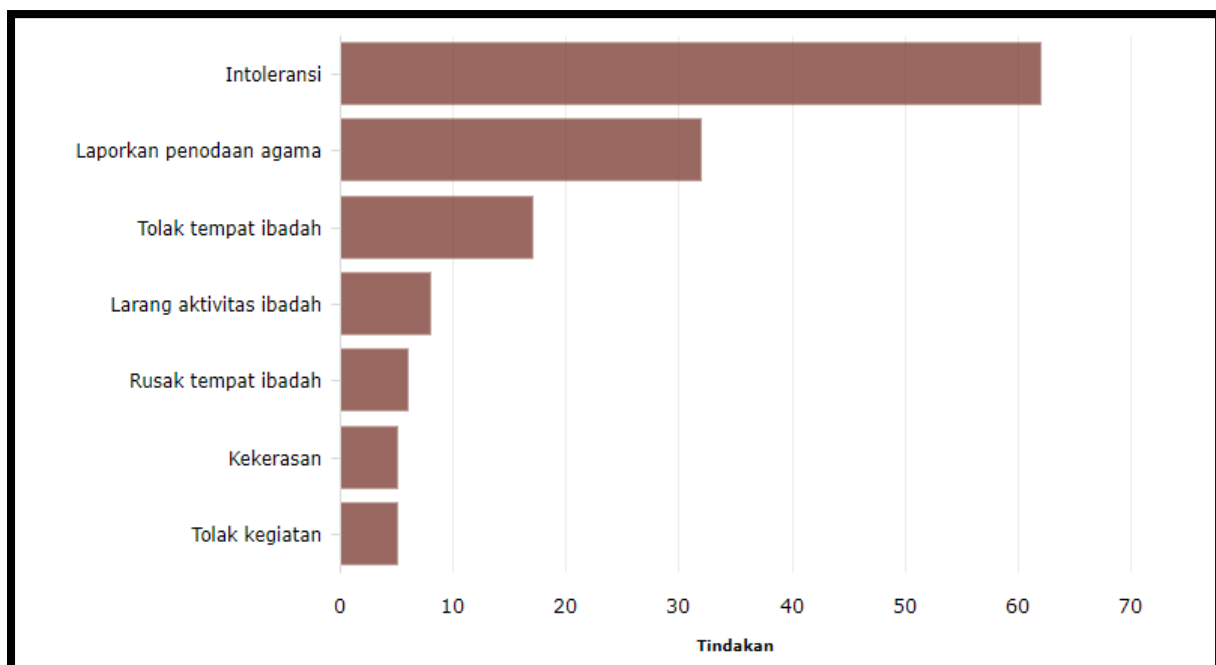
Indonesia adalah negara kepulauan terbesar di dunia yang terdiri dari 17.504 pulau dengan populasi mencapai 273.879.750 jiwa per Desember 2021. Indonesia menjadi negara berpenduduk terbesar keempat di dunia dan negara berpenduduk Muslim terbesar di dunia, dengan penganut lebih dari 230 juta jiwa (Wikipedia, 2022). Indonesia adalah salah satu negara multietnik dan multikultural di dunia seperti halnya Amerika Serikat. Masyarakat Indonesia dalam Negara Kesatuan Republik Indonesia memiliki keragaman, mencakup beraneka ragam etnis, bahasa, agama, budaya, dan status sosial. Keragaman dapat menjadi "*integrating force*" yang mengikat kemasyarakatan namun dapat menjadi penyebab terjadinya benturan antar budaya, antar ras, etnik, agama dan antar nilai-nilai hidup.

Keragaman budaya (multikultural) merupakan peristiwa alami karena bertemunya berbagai budaya, berinteraksinya beragam individu dan kelompok dengan membawa perilaku budaya, memiliki cara hidup berlainan dan spesifik. Keragaman seperti keragaman budaya, latar belakang keluarga, agama, dan etnis tersebut saling berinteraksi dalam komunitas masyarakat Indonesia. Dalam komunikasi horizontal antar masyarakat, Mulyana menyebut, benturan antar suku masih berlangsung di berbagai wilayah, mulai dari sekedar stereotip dan prasangka antar suku, diskriminasi, hingga ke konflik terbuka dan pembantaian antar suku yang memakan korban jiwa

(Mulyana, 2008). Persaingan antar suku tidak hanya di kalangan masyarakat tetapi juga di kalangan elit politik bahkan akademisi untuk menempati jabatan di berbagai instansi.

Dalam masyarakat multikultural, interaksi sesama manusia cukup tinggi intensitasnya, sehingga kemampuan sosial warga masyarakat dalam berinteraksi antar manusia perlu dimiliki setiap anggota masyarakat. Kemampuan tersebut menurut Curtis, mencakup tiga wilayah, yaitu: *affiliation* (kerja sama), *cooperation and resolution conflict* (kerjasama dan penyelesaian konflik), *kindness, care and affection/ emphatic skill* (keramahan, perhatian, dan kasih sayang).

Keragaman suku, ras, agama, perbedaan bahasa dan nilai-nilai hidup yang terjadi di Indonesia sering berbuntut berbagai konflik. Konflik di masyarakat yang bersumber pada kekerasan antar kelompok yang meledak secara sporadis di berbagai kawasan di Indonesia menunjukkan betapa rentannya rasa kebersamaan yang dibangun dalam Negara-Bangsa Indonesia, betapa kentalnya prasangka antara kelompok dan betapa rendahnya saling pengertian antar kelompok. Berikut adalah data terkait dengan tindakan pelanggaran kebebasan beragama:



Sumber: Setara Institute, 2021

Konflik berbasis kekerasan di Indonesia seringkali berakhir menjadi bencana kemanusiaan yang cenderung berkembang dan meluas baik dari jenis maupun pelakunya. Hal ini yang menjadikan proses penanganan konflik membutuhkan waktu lama dengan kerugian sosial, ekonomi, dan politik yang luar biasa. Berdasarkan masalah-masalah yang datang silih berganti ini, Indonesia bisa masuk dalam situasi darurat kompleks. Konflik dan kekerasan sudah masuk dalam berbagai lingkungan masyarakat. Faktor pemicu tindak-tindak kekerasan yang selama ini terjadi seringkali merupakan muara terjadinya konflik yang tertangani secara keliru. Konflik merupakan penyebab bagi kekerasan, karena dibalik setiap bentuk kekerasan terdapat konflik yang belum terselesaikan. Konflik telah mencapai titik kekerasan dapat dipastikan karena konflik telah tertangani secara keliru atau konflik telah diabaikan. Budaya kekerasan berfokus pada anggapan bahwa konflik sebagai perusak atau penghancur. Konflik dipandang sebagai pergulatan yang baik dan jahat, hitam dan putih, kemenangan dan kekalahan, keuntungan dan kerugian. Konflik dapat dianggap sebagai

penyebab niscaya bagi kekerasan, jika keberadaannya dipersepsikan negatif dan diselesaikan dengan cara kompetitif. Oleh karena itu perlu diusahakan agar konflik ditangani lebih serius untuk menciptakan ke damaian di masyarakat, olehnya dibutuhkan pemahaman agama yang moderat demi terciptanya keharmonisan beragama pada masyarakat Indonesia yang multikultur.

2. METODE PENELITIAN

Jenis penelitian yang digunakan penelitian kualitatif deskriptif kepustakaan (*library research*). Teknik pengambilan data yang dilakukan peneliti yakni mengumpulkan data dari berbagai sumber pustaka baik dari buku, jurnal, hasil seminar dan diskusi dengan para ahli yang relevan dengan tema penelitian. Setelah data terkumpul peneliti melakukan analisis data dengan teknik interpretasi data dan peneliti memberikan penjelasan secukupnya ditinjau dari teori yang relevan dengan permasalahan yang dihadapi.

3. HASIL DAN PEMBAHASAN

a. Urgensi moderasi beragama di Indonesia

Penguatan moderasi beragama di Indonesia saat ini penting dilakukan didasarkan fakta bahwa Indonesia adalah bangsa yang sangat majemuk dengan berbagai macam suku, bahasa, budaya dan agama. Indonesia juga merupakan negara yang agamis walaupun bukan negara berdasarkan agama tertentu. Hal ini bisa dirasakan dan dilihat sendiri dengan fakta bahwa hampir tidak ada aktivitas keseharian kehidupan bangsa Indonesia yang lepas dari nilai-nilai agama. Keberadaan agama sangat vital di Indonesia sehingga tidak bisa lepas juga dari kehidupan berbangsa dan bernegara. Selain itu moderasi beragama juga penting untuk digabungkan dalam konteks global di mana agama menjadi bagian penting dalam perwujudan peradaban dunia yang bermartabat.

Moderasi beragama sebagai upaya untuk senantiasa menjaga agar seberagam apapun tafsir dan pemahaman terhadap agama tetap terjaga sesuai koridor sehingga tidak memunculkan cara beragama yang ekstrem. Mantan Menteri Agama Lukman Hakim Saefudin menerangkan bahwa moderasi beragama bukanlah ideologi. Moderasi agama adalah sebuah cara pandang terkait proses memahami dan mengamalkan ajaran agama agar dalam melaksanakannya selalu dalam jalur yang moderat. Moderat di sini dalam arti tidak berlebih-lebihan atau ekstrem. Jadi yang dimoderasi di sini adalah cara beragama, bukan agama itu sendiri (Amin, 2021). Agama sendiri merupakan sesuatu yang sudah sempurna karena datangnya dari Tuhan yang Maha Sempurna. Namun cara setiap orang dalam memahami dan mengamalkan ajaran agama memiliki perbedaan. Hal ini karena keterbatasan manusia dalam menafsirkan pesan-pesan agama sehingga muncul keragaman. Jika pemahaman dan penafsiran yang muncul tidak sesuai dengan nilai-nilai agama tentu akan terjebak pada pemahaman yang berimplikasi pada tindakan yang berlebih-lebihan. Inilah yang kemudian dinamakan sebagai beragama yang ekstrem.

Kita paham semua bahwa sumber utama agama adalah teks yang terwujud dalam bentuk kitab suci dan orang-orang suci yang mendapat risalah untuk disampaikan kepada umat manusia. Dalam memahami ini, bisa saja seseorang terjebak pada pemahaman dua kutub ekstrem yang pada dasarnya sama-sama berlebih-lebihan. Satu kutub terlalu tertumpu pada teks itu sendiri tanpa melihat konteks dari teks tersebut yang memunculkan sikap konservatif maupun ultra konservatif. Sementara kutub lainnya terlalu bertumpu pada otak dan nalar sehingga dalam memahami teks selalu mengandalkan konteks dan mengakibatkan keluar dari teks itu sendiri. Kutub kedua inilah yang memunculkan pemahaman liberal dan ultra liberal. Dua kutub yang berlebih-lebihan ini sama-sama mengancam kehidupan beragama dalam mewujudkan peradaban dunia. Dua kutub ekstrem ini kan terus berjalan dinamis sehingga moderasi beragama juga harus dinamis dengan terus memposisikan diri di tengah.

Ada dua hal yang menjadi prinsip dan ciri moderasi beragama yang pada hakikatnya merupakan ajaran agama itu sendiri. Pertama adalah adil yakni harus melihat secara adil dua kutub yang ada dan kedua adalah berimbang dalam melihat persoalan yang ada. Artinya memahami teks harus sesuai dengan konteks, memahami konteks harus sesuai dengan teks (Faizin, 2020). Tolak ukur dari moderasi beragama adalah kemanusiaan yang memang menjadi inti dari beragama itu sendiri. sehingga bisa merangkul pemahaman ekstrem kembali ke posisi moderat dengan tidak menyingkirkan, menyalahkan, ataupun mengkafir-kafirkannya. Jadi, jika ada orang yang memahami ajaran agama dan mengatasnamakan agama namun merendahkan harkat dan martabat kemanusiaan, apalagi menghilangkannya, maka ini sudah dipastikan berlebih-lebihan.

Dalam konteks Indonesia, komitmen kebangsaan harus ditegaskan kembali karena bagaimanapun juga keutuhan bangsa yang menjadi tempat umat beragama mengartikulasikan agama harus senantiasa terjaga keamanan dan kedamaianannya. Tidak boleh atas nama agama merusak sendi-sendi kehidupan dan kedamaian berbangsa. Kedamaian dalam sebuah bangsa menjadi syarat dalam kenyamanan mengimplementasikan nilai-nilai agama. Selain itu penting juga mengakomodasi ragam budaya lokal bangsa yang memiliki kekayaan khazanah dalam memahami agama. Seseorang harus senantiasa melihat budaya yang ada. Jika pun secara prinsip ada budaya yang bertentangan dengan inti pokok ajaran agama, maka harus melakukan pendekatan persuasif. Karena agama tidak bisa dibawa dengan cara-cara kekerasan.

Dalam Pasal 29 Undang-undang 1945 ditegaskan bahwa negara berdasar atas Ketuhanan Yang Maha Esa dan Negara menjamin kemerdekaan tiap-tiap penduduk untuk memeluk agamanya masing-masing dan untuk beribadat menurut agamanya dan kepercayaannya itu. Pasal ini menjadi dasar dan amanah agar negara menjamin kemerdekaan terhadap dua hal yakni kebebasan memeluk agama dan kebebasan beribadah sesuai kepercayaan. Indonesia sendiri memiliki relasi yang khas antara agama dengan negara. Indonesia bukan negara sekuler dan juga bukan negara agama yang berdasar pada agama tertentu. Sehingga negara memposisikan diri terhadap agama pada tiga ranah yakni pertama menjamin kemerdekaan terhadap dua hal yakni kebebasan memeluk agama dan kebebasan beribadah sesuai kepercayaan. Kedua, negara memberi fasilitasi pada agama dan tidak bisa lepas tangan terhadap hal ikhwil keagamaan warga negaranya. Negara juga tidak bisa represif dan 'memaksa' warga negaranya untuk menganut perilaku keagamaan tertentu. Ketiga, memberikan pedoman terhadap kehidupan beragama seperti adanya sidang isbat, penyelenggaraan haji, pendirian rumah ibadah, dan lainnya. Meskipun pedoman ini juga tidak bisa dipaksakan Agama sendiri bisa selalu dilihat dari dua perspektifnya yang berbeda. Pertama adalah perspektif formal institusional yang menyebabkan pendekatannya selalu segregatif (terpisah) yang melihat agama sebagai sebuah institusi formal seperti Islam, Kristen, Hindu dan lain-lain termasuk berbagai paham-paham yang ada dalam agama itu sendiri. Yang kedua adalah perspektif esensial atau substansial yang lebih menitikberatkan pada nilai-nilai ajarannya yang cenderung sama dan tidak terlihat keragaman agama satu dengan agama yang lain. Karena inti pokok ajaran agama itu pada dasarnya sama, seperti kemanusiaan, keadilan, persamaan di depan hukum, menghormati hak asasi manusia dan nilai-nilai universal lainnya.

b. Kondisi keberagamaan di Indonesia

Indonesia adalah negara dengan sejuta keberagaman. Keberagaman yang ada telah menjadi simbol persatuan dan dikemas dalam bingkai Bhinneka Tunggal Ika. Kondisi keberagamaan di Indonesia memiliki daya tarik tersendiri untuk diteliti mengingat kondisi bangsa Indonesia yang multi etnis dan multi agama. Berbagai macam kasus dapat kita lihat baik antara satu paham keagamaan dengan mudahnya menyesatkan paham keagamaan lainnya, begitunya

sebaliknya. Seperti nikah beda agama dan penistaan agama. Jika agama diyakini oleh semua orang sebagai pedoman hidup, maka agama akan bernilai dinamis, universal, fleksibel dan berorientasi kedepan. Apapun agamanya jika tidak diakui, diikuti, atau tidak diyakini sebagai pedoman hidup dan sebagai kebenaran mutlak maka tidak akan memiliki makna apa-apa bagi para penganutnya. Dengan begitu dinamika kehidupan beragama dapat dilihat dari para penganutnya (Ghazali, A. M., 2017).

Masing-masing pemeluk agama memiliki tata cara pengalaman dan ajarannya masing-masing dengan penuh kesadaran untuk tidak saling membenarkan agama yang dianutnya. Sebab tiap agama mempunyai ajaran-ajaran yang khusus, yang membedakan dan memiliki ciri-ciri yang tidak sama dengan yang lain. Adanya perbedaan-perbedaan diantara agama-agama dalam berinteraksi secara penuh, tidak menonjolkan identitas agama, dan juga tidak mengaktifkan simbol-simbol agama termasuk telah menghargai perbedaan-perbedaan itu. Dengan demikian wujud kerukunan atau toleransi antar umat beragama akan terlaksana apabila interaksi antar umat beragama tidak saling merugikan.

Setiap agama harus melaksanakan dan menggariskan dua pola hubungan setiap pemeluknya untuk mewujudkan kebaikan, yaitu hubungan yang horizontal dan hubungan yang bersifat vertikal. Hubungan yang bersifat horizontal atau pola hubungan manusia dengan masyarakat sekitar atau hubungan manusia dengan sesamanya yang berbeda ras, kebudayaan, agama baik itu dalam bentuk kemasyarakatan seperti bekerja sama, ataupun pola individu dengan individu untuk menjalin rasa persaudaraan yang lebih erat. Sedangkan hubungan vertikal membentuk hubungan manusia dengan penciptanya diwujudkan dengan setiap harinya beribadah sebagaimana digariskan pada tiap-tiap agama (Pradipta, Y., Arifin, K., & Fadhil, 2014).

Manusia di Indonesia membentuk dan menentukan corak masyarakat agar terbentuk dan terwujud dengan baik sesuai dengan yang dikehendaki, dalam kehidupan beragama di Indonesia keberagaman perlu dipelihara, sebab kenyataan alam semesta ini telah ditetapkan oleh pemiliknya, jika ada yang menolak, dia akan menemukan kesulitan, karena berlawanan dengan kenyataan itu sendiri (Suryana, 2011). Tidak adanya alternatif lain bagi manusia mengingat keberagaman adalah ketentuan dan realita dari Tuhan pemilik alam semesta.

Selain memelihara dan menerima dengan mengajak kepada tujuan dan kepentingan bersama. Saling bergesekkan akan terjadi apabila tidak di pelihara dengan baik dan mengakibatkan terjadinya perpecahan, bahkan sampai kepada separatisme. Tetapi karena keberagaman di Indonesia dan mengingat bangsa Indonesia adalah bangsa religius mengetahui bahwa segalanya ketentuan adalah takdir Allah yang mengatur alam, maka menggalang dan membina adalah suatu bentuk untuk persatuan bangsa Indonesia, tidak hanya itu saja terhimpuh hasrat-hasrat yang ada menjadi kolektif dari keberagaman tersebut dan memelihara, membangun keutuhan dan kesatuan bangsa dan negara. Dengan beragama tidak mengurangi rasa kebangsaan walaupun agama bersifat universal bahkan tambah menguatkan rasa kebangsaan. Karena membela kehormatan dan kedaulatan bangsa dan negara adalah cara agama mendorong para penganutnya (Suryana, 2011).

Berbagai hasil penilaian capaian tentang kerukunan (atau dengan istilah/sebutan yang lain) telah dibuat, namun tidak semuanya dapat digunakan sebagai ukuran karena dilakukan berdasarkan tujuan, teknis, dan standar yang berbeda-beda. Kementerian Agama selaku instansi pemerintah yang bertugas sebagai penyelenggara pemerintahan di bidang agama perlu menetapkan suatu ukuran standar penyusunan indeks kerukunan umat beragama yang disusun secara komprehensif dengan standar nasional. Indeks kerukunan dimaksud dibentuk dari tiga indikator besar, yaitu toleransi, kesetaraan, dan kerjasama.

Indikator toleransi merepresentasikan dimensi saling menerima, menghormati/ menghargai perbedaan. Kesetaraan, mencerminkan keinginan saling melindungi, memberi kesempatan yang sama dengan tidak mengedepankan superioritas. Selanjutnya, kerjasama menggambarkan keterlibatan aktif bergabung dengan pihak lain dan memberikan empati dan simpati kepada kelompok lain dalam dimensi sosial, ekonomi, budaya dan keagamaan. Oleh karena itu, untuk

peningkatan kerukunan umat beragama, orientasinya tidak hanya pada aspek toleransi semata, karena sikap toleransi itu baru merupakan syarat awal. Agar kerukunan umat beragama tumbuh semakin kuat, maka toleransi harus disertai dengan adanya sikap kesetaraan. Selanjutnya, sikap kesetaraan harus diiringi tindakan nyata dalam bekerjasama di tengah masyarakat majemuk. Dengan kerjasama yang tulus, terbangun kepercayaan yang kuat diantara sesama anak bangsa dengan pemahaman bersama bahwa mereka dapat hidup berdampingan dengan damai, tenang, saling memajukan dan menguatkan, tidak untuk saling menyakiti dan menyingkirkan.

Gambar 3.1: Indeks Kerukunan Umat Beragama di Indonesia Tahun 2021.



Sumber: kemenag.go.id

Dari hasil survey tersebut terlihat bahwa Nilai Indeks Kerukunan Umat Beragama (KUB) Tahun 2021 masuk pada kategori baik. Nilainya berada pada rerata nasional 72,39 atau naik 4,93 poin dari tahun sebelumnya. Hal ini menunjukkan bahwa kondisi keberagamaan di Indonesia saat ini berada dalam kondisi baik. Hal ini dikarenakan sikap toleransi dan

kerjasama yang cukup tinggi dikalangan masyarakat Indonesia dengan semangat bineka tunggal ika nya menjadikan mereka yang berbeda baik suku, ras maupun agama merasa senasib seperjuangan.

4. PENUTUP

Moderasi agama adalah sebuah cara pandang terkait proses memahami dan mengamalkan ajaran agama agar dalam melaksanakannya selalu dalam jalur yang moderat. Moderat di sini dalam arti tidak berlebih-lebihan atau ekstrem. Jadi yang dimoderasi di sini adalah cara beragama, bukan agama itu sendiri. Agama sendiri merupakan sesuatu yang sudah sempurna karena datangnya dari Tuhan yang Maha Sempurna. Namun cara setiap orang dalam memahami dan mengamalkan ajaran agama memiliki perbedaan. Hal ini karena keterbatasan manusia dalam menafsirkan pesan-pesan agama sehingga muncul keragaman. Jika pemahaman dan penafsiran yang muncul tidak sesuai dengan nilai-nilai agama tentu akan terjebak pada pemahaman yang berimplikasi pada tindakan yang berlebih-lebihan. Moderasi beragama sebagai upaya untuk senantiasa menjaga agar seberagam apapun tafsir dan pemahaman terhadap agama tetap terjaga sesuai koridor sehingga tidak memunculkan cara beragama yang ekstrem. Karena inti pokok ajaran agama itu pada dasarnya sama, seperti kemanusiaan, keadilan, persamaan di depan hukum, menghormati hak asasi manusia dan nilai-nilai universal lainnya. Kondisi keberagamaan di Indonesia saat ini berada dalam kondisi baik. Hal ini dikarenakan sikap toleransi dan kerjasama yang cukup tinggi dikalangan masyarakat Indonesia dengan semangat bineka tunggal ika nya menjadikan mereka yang berbeda baik suku, ras maupun agama merasa senasib seperjuangan.

DAFTAR PUSTAKA

- Alam, M. (2017). Studi Implementasi Pendidikan Islam Moderat dalam Mencegah Ancaman Radikalisme di Kota Sungai Penuh Jambi.
- Ali, Z. (2010). Pendidikan Agama Islam. Jakarta: Bumi Aksara.
- Amin, F. (2021). *MODERASI DALAM BERAGAMA*. <http://www.mikhadijahmlg.sch.id/>
- Faizin, M. (2020). *Moderasi Beragama dan Urgensinya*. <https://uninus.ac.id/moderasi-beragama-dan-urgensinya>
- Ghazali, A. M., & B. (2017). *Pendidikan Islam dalam Dinamika Kehidupan Beragama di Indonesia*. Intizar.
- Mulyana, D. (2008). *Komunikasi efektif "Suatu pendekatan lintas budaya"*. Remaja Rosdakarya.
- Pradipta, Y., Arifin, K., & Fadhil, A. (2014). Efektivitas Komunikasi Interpersonal Umat Beragama di Perumahan Bekasi. *Jurnal Studi Al-Qur'an; Membangun Tradisi Berfikir Qur'ani. Jurnal Studi Al-Qur'an; Membangun Tradisi Berfikir Qur'ani*.
- Suryana, T. (2011). Konsep dan aktualisasi kerukunan antar umat beragama. *Pendidikan Agama Islam -Ta'lim*, 9(2), 127–136.
- Rozi, S. (2019). Pendidikan Moderasi Islam KH. Asep Saifuddin; Mencegah Radikalisme Agama dan Mewujudkan Masyarakat Madani Indonesia. *TARBIYA ISLAMIA: Jurnal Pendidikan*
- Shihab, M. Q. (2017). *Wawasan al-Qur'an; Tafsir Maudu'i atas Berbagai Persoalan Ummat*. Bandung: Mizan.

Syafrudin. (2009). Paradigma Tafsir Tekstual Dan Kontekstual (Usaha Memaknai Kembali Pesan Al-Qur'an). Yogyakarta: Pustaka Pelajar.

Yasid, A. (2010). Membangun Islam Tengah. Yogyakarta: Pustaka Pesantren.

Zamimah, I. (2018). Moderatisme Islam dalam Konteks Keindonesiaan. Al-Fanar, 1(1), 75– 90.